



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. MT. Haryono No. 56 Telepon (0234) 271294 - 274190
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 800/Kep. -disdik
Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sarana strategis yang diterapkan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refosmasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- b. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;

- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

	<p>Ditetapkan di : INDRAMAYU Pada Tanggal : 20 Maret 2017</p> <hr/> <p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd Pembina Utama Muda NIP.: 19601108 198109 1 005</p>
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan Pemerintah Pusat, maka langkah-langkah yang ditempuh antara lain penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan diterapkan, saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara PAN&RB dan Bappenas secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan

terukur, sehingga penyelenggaraan dan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Manfaat IKU

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih, dapat dipertanggungjawabkan serta memunculkan pencitraan publik yang positif, dilakukan penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, system informasi dan system pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan, memperbaiki manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelola pendidikan maka dipandang perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU), dengan manfaat dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target serta arah strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Kebijakan pembangunan pendidikan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2014-2019. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam Rencana Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi kunci utama di dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian setiap tahun Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dapat ditetapkan, (dapat dilihat pada lampiran IKU).

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu diharapkan dapat dijadikan pedoman serta ukuran kinerja di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan para pimpinan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu bukan hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan kegiatan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Indramayu.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD DINAS PENDIDIKAN
TUGAS MELAKSANAKAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN
SASARAN MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN
FUNGSI a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan
 e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama di bidang pendidikan
 f. Pelaksanaan pengelolaan UPT
 g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
SS.1	Meningkatnya Perilaku Positif Siswa	Rata-rata nilai peralaku siswa PAUD minimal baik	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini	Jumlah nilai perilaku siswa PAUD minimal baik/Jumlah siswa PAUD X 100	PAUD

		Rata-rata nilai peralaku siswa SD/SMP/SM minimal baik	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Jumlah nilai perilaku siswa SD/SMP/SMPLB minimal baik/Jumlah siswa SD/SMP/SMPLB X 100	DIKDAS
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB minimal nilai baik	indeks	Pelayanan prima penunjang fungsi pendidikan	Jumlah nilai perilaku siswa berintegritas minimal baik/Jumlah siswa X 100	SMP
		Prosentase Jumlah Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	%	Meningkatnya jumlah orang dewasa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga	Jumlah orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga/Jumlah orang dewasa x 100	PNF
		Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja Baik	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Jumlah pendidik PTK berkinerja baik/jumlah PTK x 100	DIKDAS
SS.2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	APK PAUD usia 3-6 tahun	%	Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah	Jumlah peserta didik jenjang TK/RA/ Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun X 100	PAUD

		Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	Pelayanan prima penunjang fungsi pendidikan	Jumlah sekolah jenjang PAUD yang terakreditasi B/Jumlah sekolah X 100	PAUD
		Prosentase Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	%	Pelayanan prima penunjang fungsi pendidikan	Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif/Jumlah lembaga PAUD X 100	PAUD
SS.3	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar	APK SD/SDLB/Paket A	%	Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah	Jumlah seluruh siswa SD/SDLB/Paket A/Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun X 100	SD
		APM SD/SDLD	%	Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah	Jumlah siswa jenjang SD usia 7-12 tahun/Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun X 100	SD
		APK SMP/SMPLB/Paket B	%	Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah	Jumlah seluruh siswa SMP/SMPLB/Paket B/Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun X 100	SMP

		APM SMP/SMPLB	%	Mengurangi kesenjangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah siswa usia sekolah	Jumlah siswa jenjang SMP usia 13-15 tahun/Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun X 100	SMP
		Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	%	Pelayanan prima penunjang fungsi pendidikan	Jumlah sekolah jenjang SD yang terakreditasi B/Jumlah sekolah X 100	SD
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	%	Pelayanan prima penunjang fungsi pendidikan	Jumlah sekolah jenjang SMP yang terakreditasi B/Jumlah sekolah X 100	SMP
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Capaian indikator SPM SD/SDLB/Indikator SPM SD/SDLB X 100	SD
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Capaian indikator SPM SMP/SMPLB/Indikator SPM SMP/SMPLB X 100	SMP

		Persentase siswa SD/MI memperoleh Rerata ujian sekolah minimal 7,00	%	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan terkait dengan nilai ujian sekolah	Jumlah nilai US keseluruhan/Jumlah peserta US X 100	SD
		Persentase siswa SMP/MTs memperoleh Rerata ujian nasional minimal 7,00	%	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan terkait dengan nilai ujian nasional	Jumlah nilai UN keseluruhan/Jumlah peserta UN X 100	SMP
		Prosentase Jumlah satuan pendidikan yang membaca Al Quran minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Jumlah satuan pendidikan yg membaca alquran minimal 15 menit sebelum PBM/Jumlah satuan pendidikan X 100	DIKDAS
		Prosentase Jumlah PTK yang membaca buku literatur minimal 15 menit sebelum proses pembelajaran.	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Jumlah PTK yg membaca buku literatur minimal 15 menit sebelum PBM/Jumlah PTK X 100	DIKDAS
		Prosentase Jumlah satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan tata kelola kelembagaan minimal baik	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Jumlah satuan pendidikan yg menyelenggarakan tata kelola kelembagaan minimal baik/Jumlah satuan pendidikan X	DIKDAS

					100	
		Persentase pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	%	Indikator Makro Pendidikan	Nilai survey kepuasan pemangku kepentingan pendidikan	DIKDAS
		Prosentase Jumlah sekolah yang menerapkan model pembelajaran berbasis TIK sekurang-kurangnya 500 satuan pendidikan	%	meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dasar	Jumlah sekolah yang menerapkan model pembelajaran berbasis TIK/Jumlah sekolah X 100	DIKDAS
SS.4	Meningkatnya literasi angka penduduk usia 15 tahun ke atas melalui akses pendidikan non formal	Angka melek huruf (AMH) penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	%	Mengurangi penduduk yang buta aksara dan meningkatkan taraf hidup penduduk	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis/jumlah penduduk usia 15 tahun keatas X 100	PNF
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	Indikator Makro Pendidikan	Jumlah penghitungan lama pendidikan x jumlah penduduk usia > 25 tahun yang menyelesaikan pendidikan berijazah SD/SMP/SMA/PT :	

					Jumlah penduduk usia > 25 tahun	
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	Indikator Makro Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah > 25 tahun yang bersekolah pada tahun sekolah : Jumlah penduduk usia >25 tahun pada tahun sekolah X 100	
		Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang terakreditasi sekurang-kurangnya minimal nilai B	%	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan terkait dengan kursus dan pelatihan yang terakreditasi minimal B	Jumlah LKP yang terakreditasi B/Jumlah LKB X 100	PNF
		Jumlah lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan atau UPTD) sekurang-kurangnya 25 LKP	%	meningkatkan lembaga masyarakat untuk menjadikan LKP rujukan	Jumlah lembaga masyarakat rujukan/jumlah PKBM, kursus dan pelatihan atau UPTD X 100	PNF

		Presentase mutu pendidikan non formal yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sekurang-kurangnya 250 wajib belajar	%	Meningkatnya mutu pendidikan non formal yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah mutu pendidikan Non formal yang berwawasan gender/jumlah LPM X 100	PNF
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sekurang-kurangnya 75 lembaga	%	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan terkait dengan kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	Jumlah kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI/Jumlah kursus dan pelatihan X 100%	PNF
SS.5	Meningkatnya Profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional yang sudah mendapatkan sertifikasi	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Jumlah pendidik Dikdas bersertifikasi/jumlah pendidik x 100	DIKDAS
		Prosentase Jumlah PTK PNF profesional yang berkualifikasi S.1	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Jumlah pendidik PNF bersertifikasi/jumlah pendidik x 100	PNF

		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Capaian indikator SPM Guru/Indikator SPM Guru X 100	DIKDAS
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Capaian indikator SNP Guru/Indikator SNP Guru X 100	SMP
		Prosentase profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan sesuai SPM	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Capaian indikator SPM Guru/Indikator SPM Guru X 100	DIKDAS
		Prosentase Jumlah peserta didik yang melaksanakan pengembangan karakter siswa sekurang-kurangnya 2000 siswa	%	Agar setiap peserta didik selalu termotivasi untuk dapat mengembangkan karakter	Jumlah peserta didik yang mengembangkan karakter/jumlah peserta didik X 100	DIKDAS

		Prosentase Jumlah siswa dan guru yang berprestasi di bidang Seni, OR dan sains	%	Agar setiap peserta didik selalu termotivasi untuk dapat prestasi	jumlah cabagn yang dilombakan - jumlah cabang yang tidak dapat prestasi	DIKDAS
		Prosentase Jumlah PTK PAUD Profesional yang berkualifikasi S.1	%	Sesuai dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru sudah S1	Jumlah pendidik jenjang PAUD bersertifikasi/jumlah pendidik x 100	PAUD

Indramayu, 16 Oktober 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

OPD DINAS PENDIDIKAN
 TUGAS MELAKSANAKAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN
 STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROSES PENDIDIKAN YANG UTUH
 SASARAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
 PROGRAM 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Program Pendidikan Dasar
 3. Program Pendidikan Non Formal
 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 5. Program Manajemen Pendidikan
 6. Program Pendidikan Layanan Khusus
 7. Program Dukungan Manajemen Lainnya

NO	PROGRAM/TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SP.1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)									
SP.1.1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu	Meningkatnya akses PAUD	APK PAUD	45,00	45,00	47,25	49,61	52,09	54,70	57,43
			APM PAUD	40,00	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05
			Jumlah lembaga PAUD	366	366	384	404	424	445	467
			Jumlah Kelompok Bermain	60	60	63	66	69	73	77
			Jumlah TPA	2	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Satuan PAUD Sejenis	397	397	417	438	460	483	507
			Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	16,45	16,45	17,28	18,14	19,05	20,00	21,00

			Jumlah PTK PAUD profesional	215	215	473	558	643	728	813
SP.1.2	Terwujudnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD	% guru TK bersertifikat pendidik	24,87	24,87	24,87	28,87	33,87	39,87	46,87
			% PTK PAUD yang memiliki indeks kinerja minimal baik	53,34	53,34	53,34	57,84	62,84	67,84	73,84
			% PTK PAUD yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosisl)	53,34	53,34	55,34	59,14	62,94	67,74	73,74
			%PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus.	52,55	52,55	52,55	54,55	56,55	58,55	60,55
			% PTK PAUD berkualifikasi Si/D4	28,87	28,87	28,87	33,87	39,87	46,87	46,87
			% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan	25,00	25,00	27,00	54,55	56,55	58,55	60,55
			% PTK PAUD yang meningkat karirnya	25,00	25,00	27,00	32,00	37	42	47
			% PAUD yang memiliki PTK sesuai SNP	15,00	15,00	17,00	22,00	27	32	37
			Rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4

SP.1.3	Terwujudnya Tata Kelola PAUD yang transparan dan akuntabel	Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bidang PAUD	Jumlah dokumen data dan informasi PAUD	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah dokumen program dan anggaran Bidang PAUD	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Bidang PAUD	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah dokumen pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	1	1	1	1	1	1

			Jumlah SDM Bidang PAUD meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	10	10	10	10	10	10	10
			Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga/satuan PAUD memperoleh penguatan kapasitas	1	1	1	1	1	1	1
SP.1.4	Meningkatnya Layanan pengkajian, pengembangan Model/ program, dan pemetaan mutu PAUD	Fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan yang bermutu	jumlah guru yang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60	60	60	60	60
			Jumlah Lembaga/satuan PAUD yang menerapkan model/program hasil kajian/ pengembangan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen NSPK pengkajian dan pengembangan model/program PAUD yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	1	1	1	1	1	1	1
			Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	1	1	1	1	1	1	1

			Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD	1	1	1	1	1	1	1
SP.1.5	Terciptanya Penyediaan layanan PAUD	Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PAUD	Jumlah Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD	11.108	11.108	14.645	15.377	16.146	16.954	16.674
			Jumlah lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi	200	200	500	700	900	1.000	1.500
			Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir	150	150	750	1.225	1.750	2.100	3.000
			Jumlah Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE	30	30	100	20	45	75	140
			Jumlah Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD	40	40	310	465	465	620	775
			Jumlah dokumen penyelenggaraan HAN, Lomba dan Apresiasi	10	10	30	30	35	35	40
			Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan kurikulum 2013	36	36	30	30	50	50	50

			Jumlah lembaga PAUD baru yang terbentuk	36	36	30	30	50	50	50
			Jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun	1.800	1.800	1.800	1.800	2.600	3.250	3.250
			Jumlah ruang kelas baru PAUD yang direhabilitasi	525	525	525	525	850	1.275	1.275
			Jumlah pengadaan Sarana pendidikan PAUD	1.500	1.500	1.500	1.500	220	275	300
			Jumlah Rehabilitasi PAUD	1.125	1.125	1.125	1.125	1.700	2.125	3.000
			Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	1.800	1.800	1.800	1.800	2.600	3.250	4.050
			jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru PAUD	350	350	350	350	400	450	500
			Jumlah PAUD Terakreditasi	50	50	50	50	65	75	100
			Jumlah Lomba-lomba PAUD	50	50	50	50	75	75	100
			Jumlah Pembangunan Gedung PAUD Baru	1.050	1.050	1.074	1.074	1.074	2.148	2.148
SP.2	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR									
SP.2.1	Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas	Terlaksananya pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	APS Penduduk usia 7-12 tahun	99,70	99,70	99,75	99,80	99,90	100,00	100,00
			APS Penduduk Usia 13-15 tahun	91,74	91,74	93,81	95,88	97,95	100,00	100,00
			APK SD/SDLB/Paket A	118,40	118,40	118,81	119,71	120,61	121,51	122,41
			APK					95,48		

			SMP/SMPLB/Paket B	86,48	86,48	89,48	92,48		98,48	101,48
			APM SD/SDLB/Paket B	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	100,00
			APM SMP/SMPLB	80,02	80,02	84,01	88,01	92,00	96,00	100,00
			Angka Putus Sekolah SD	0,130	0,130	0,03	0,02	0,01	0	0
			Angka Putus Sekolah SMP	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
			Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA							
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun	91,74	91,74	93,81	95,88	97,95	100,00	100,00
			Angka Lulusan (AL) SD-MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Rasio siswa - sekolah SD	192	192	192	192	192	192	192
			Rasio siswa - sekolah SMP	384	384	384	384	384	384	384
			Rasio siswa - Guru SD	20	20	20	20	20	20	20
			Rasio siswa - Guru SMP	20	20	20	20	20	20	20
			Rasio siswa - Ruang SD	32	32	32	32	32	32	32
			Rasio siswa - Ruang					32		

			SMP	32	32	32	32		32	32
			Rasio Siswa - Rombel SD	32	32	32	32	32	32	32
			Rasio Siswa - Rombel SMP	32	32	32	32	32	32	32
			Nilai Ujian Nasional (UN) SD	71,00	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
			Nilai Ujian Nasional (UN) SMP	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
SP.2.2	Pembinaan Sekolah Dasar	Tersedianya layanan pendidikan SD	Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	6.000	6.000	6.000	4.000	5.000	4.000	4.000
			Jumlah ruang kelas baru SD yang direhabilitasi	10.000	10.000	10.000	2.000	4.000	2.000	2.000
			Jumlah RKB yang Rehabilitasi Sekolah Dasar	1.030	1.030	10.365	12.000	14.000	16.000	18.000
			Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.234	2.234	-	7.000	6.000	5.000	4.000
			Jumlah peserta Ujian Nasional SD	120	120	100	200	250	300	300
			Jumlah SD yang mendapatkan Sarana pendidikan	3.629	3.629	5.984	6.000	6.500	7.000	7.500
			Jumlah peralatan pendidikan untuk sarana prasarana rumah pintar	4.121	4.121	-	2.000	2.250	2.500	2.750
			Jumlah Pengadaan koleksi buku pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk jenjang SD (banprop 2017)	2.000	2.000	2.382	60	70	80	100

			Jumlah Siswa SD yang mengembangkan bakat dan berprestasi di bidang seni, olah raga dan sains	31	31		50	75	100	125
			Jumlah Pengadaan paket buku pendidikan lingkungan hidup SD dalam kerangka revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar (banprop 2017)	1.395	1.395	1.189	3.000	3.000	4.000	4.000
			Jumlah Pengadaan koleksi buku ensiklopedia untuk perpustakaan SD	465	465	5.076	300	350	350	350
			Jumlah SD yang menerapkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum yang berlaku	1.335	1.335	-	100	125	150	175
			Jumlah sekolah yang Penyelenggaraan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru SD	300	300	300	500	750	900	1.000
			Jumlah Sekolah SD yang Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	75	75	50	100	105	110	120
			Jumlah siswa SD yang mengikuti Lomba-lomba Pendidikan Sekolah	12	12	50	100	125	150	175

			Dasar (SD)							
			Jumlah siswa SD penerima BOS	160.007	160.007	128.748	129.495	#####	131.001	131.761
			Jumlah siswa SD penerima bantuan melalui KIP/Bantuan Siswa Miskin (BSM)	90.472	90.472	45.000	45.261	45.524	45.788	48.077
			Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SD	46	46	50	50	75	100	125
SP.2.3	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya layanan pendidikan SMP	Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun	531	531	-	5.000	4.000	3.000	3.000
			Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	2.433	2.433	-	5.000	2.000	2.000	2.000
			Jumlah RKB SMP yang dibangun	3.300	3.300	19.409	19.409	19.797	20.193	
			Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun	2.959	2.959	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
			Jumlah laboratorium IPS SMP yang dibangun	2.959	2.959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah laboratorium Matematika SMP yang dibangun	2.959	2.959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	1.622	1.622	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
			Jumlah Penyediaan sarana prasarana sekolah	3.721	3.721	375	380	390	400	405
			Jumlah sekolah yang dapat pembangunan	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

			pagar halaman							
			Jumlah sekolah yang dapat pembangunan jamban	1.194	1.194	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Jumlah pengadaan mebelair SMP	450	450	300	300	300	300	300
			Jumlah guru SMP yang mengikuti pelatihan kurikulum 2013	690	690	300	330	330	200	100
			Jumlah Alat laboratorium bahasa berbasis kumputer	2.212	2.212	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
			Jumlah Alat laboratorium bahasa berbasis multimedia	2.212	2.212	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
			Jumlah Alat peraga IPA, Matematika dan IPS)	1.000	1.000	1.000	1.875	1.875	1.875	1.875
			Jumlah Alat peraga Olah Raga	60	60	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
			Jumlah Alat peraga kesenian	200	200	900	900	900	200	200
			Jumlah buku perpustakaan	187	187	200	200	200	200	200
			Jumlah koleksi buku pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk jenjang SMP (banprop 2017)	232	232	1.618	12	12	12	12
			Jumlah Siswa SMP yang mengembangkan bakat dan berprestasi di bidang seni, olah raga dan	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

			sains							
			Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	600	600	600	600	600	600	600
			Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi	112	112	112	112	112	112	112
			Jumlah SMP yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
			Jumlah siswa SMP yang mengikuti pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	722	722	700	700	700	700	700
			Jumlah siswa SMP yang mengirimkan pemilihan duta sanitasi pelajar SMP	25	25	50	50	50	50	50
			Jumlah siswa SMP yang mengikuti penyelenggaraan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi) dan Pasanggiri	175	175	75	75	100	100	125
			Jumlah sekolah SMP yang melaksanakan kegiatan TUB, UKS, SBL dan Bela Negara	600	600	550	550	550	550	550

			Jumlah ekolah SMP yang melaksanakan pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural	50	50	50	60	70	80	90
			Kegiatan Penyelenggaraan Expo Pendidikan	75	75	75	75	75	75	75
			Jumlah sekolah SMP yang Mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional	50	50	150	150	150	150	150
			Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	25	25	25	15	20	25	25
			Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP	135	135	20	20	21	21	22
			Jumlah siswa SMP penerima BOS	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			Jumlah siswa SMP penerima bantuan melalui KIP/Bantuan Siswa Miskin (BSM)	10.160	10.160	6.260	6.280	6.300	6.320	6.340
			Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis SMP	62	62	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
SP.3	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL									

SP.3.1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan.	Meningkatnya Akses Pendidikan Kursus dan Pelatihan PNF	AMH (Angka Melek Huruf)	97,50	97,50	98,48	99,46	100,00	100,00	100,00
			Persentase Lulusan UN Pendidikan Kesetaraan	98,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Nilai UNPK	6,00	6,00	6,00	6,20	6,40	6,60	6,80
			Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja Baik	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	80,00
			Jumlah Lembaga PKBM	10	10	10	10	10	10	10
			Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan Peningkatan dan Pembelajaran Pendidikan Non Formal	25	25	25	25	25	25	25
			Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha	20	20	20	20	20	20	20
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	5	5	5	5	5	5	5

SP.3.2	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	Meningkatnya Akses Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan PNF	jumlah Angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	16.950	16.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			Jumlah remaja dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah	50	50	50	50	50	50	50
SP.3.3	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu	Meningkatnya Akses Pendidikan Keluarga yang bermutu	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga	25	25	25	25	25	25	25
			Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua murid (POM) yang melaksanakan Sosialisasi pendidikan karakter dan budaya prestasi	31	31	31	31	31	31	31
			Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup	10	10	10	10	10	10	10

SP.3.4	Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat	Fasilitas, kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah model/program PNF yang dibakukan dan diterapkan	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah Dokumen data dan informasi PNF	3	3	3	1	1	1	1
			Jumlah dokumen program dan anggaran Bidang PNF	3	3	10	11	11	12	12
			Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Bidang PNF	3	3	3	1	1	1	1
			Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen kepegawaian dan pembinaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	1	1	1	1	1	1	1

			Jumlah SDM Bidang PNF meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	10	10	10	60	60	60	60
			Jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar dan lembaga PNF memperoleh penguatan kapasitas	1	1	1	5	5	5	5
			Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1	1	1
SP.3.5	Layanan pengkajian, pengembangan model/program, dan pemetaan mutu PNF	Fasilitas, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dan & DIKMAS Model/Program, PNF yang bermutu	Jumlah Lembaga/satuan PNF yang menerapkan model/program hasil kajian/pengembangan	31	31	31	31	31	31	31
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	1	1	1	1	1	1	1

SP.3.6	Penyediaan layanan kursus dan pelatihan	Fasilitas Kursus dan Pelatihan, kompetensi penyelenggara/ pendidik Kursus dan pelatihan, dan regulasi/ kebijakan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	150	150	200	60	60	60	60
			Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwiasaha	150	150	200	60	60	60	60
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan	5	5	35	10	10	10	10
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	5	5	10	10	10	10	10
			Jumlah jenis kompetensi kerja terstandarisasi nasional	3	3	5	5	5	5	5

			Jumlah tempat uji kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina	1	1	2	4	4	4	4
			Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	500	500	500	100	100	100	100
			Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	50	50	65	65	75	75	100
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	50	50	65	65	75	75	100
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan siap di akreditasi	50	50	50	50	60	70	70
			Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	100	100	20	5	5	5	5
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN	1	1	1	1	1	1	1
SP.3.7	Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	Fasilitas, kompetensi penyelenggara/pendidik dan regulasi/kebijakan penyelenggaraan	Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	700	700	-	1.000	1.000	1.000	1.000

		Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)								
			Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket A	100	100	200	200	200	200	200
			Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket B	95	95	125	125	125	125	125
			Jumlah warga belajar yang menyelenggaraan Paket B Pesantren Salafiah	25	25	25	50	50	50	50
			Jumlah warga belajar penyelenggaraan Paket B Kelas Baru	125	125	125	80	100	100	100
			Jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pra paket C	150	150	240	240	240	240	240
			Jumlah peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C	2	2	3	3	3	3	3

			Jumlah warga belajar penyelenggaraan Paket C setara SMA Kelas Baru	180	180	180	200	225	250	275
			Kegiatan pengembangan pendidikan kesetaraan Bintek Tutor Paket B dan Paket C	264	264	264	275	275	275	275
			Jumlah orang dewasa perempuan memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup perempuan	60	60	60	60	60	60	60
			Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	10	10	10	10	10	10	10
			Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan bahan bacaan masyarakat	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah lembaga TBM baru yang dibentuk di satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen penyelenggaraan HAI, lomba dan apresiasi	2	2	2	2	2	2	2

			Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Lomba PTK PNF	1	1	1	1	1	1	1
			Kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Pameran Kursus	1	1	1	1	1	1	1
SP.4	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
SP.4.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD	Terwujudnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD yang bermutu	Prosentase Guru bersertifikat pendidik	85,00	85,00	85,00	95,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan	58,00	58,00	58,00	59,00	80,00	81,00	85,00
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	70,00	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

SP.4.2	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dikdas	Terwujudnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang bermutu	Prosentase guru SD kualifikasi S.1/D.IV	97,27	97,27					
							98,27	98,27	99,27	99,77
			Prosentase guru SMP kualifikasi S.1/D.IV	86,46	86,46	87,86	86,46	89,32	90,78	90,78
			Persentase guru sertifikasi jenjang SD	87,33	87,33	87,89	88,33	88,45	89,01	89,01
			Persentase guru sertifikasi jenjang SMP	86,46	86,46	87,86	86,46	89,32	90,78	90,78
			Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	24	24	-	100	100	100	125
			Jumlah guru yang melaksanakan Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja kepala Sekolah Dasar	40	40	1.000	1.500	1.750	200	1.500
			Jumlah guru yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional SD	300	300	300	250	300	350	1.500
			Kegiatan yang mendapat dukungan Pelaksanaan Pemilihan Tenga Fungsional dan Komite Sekolah SD Berprestasi	25	25	93	93	93	100	93
			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SD	100	100	100	100	330	50	50

			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memiliki indeks kinerja minimal baik	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
			Nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD	70,00	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengalami peningkatan kualitas sikap (kepribadian, spiritual dan sosial)	70,00	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus (Inklusi)	2	2	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
SP.4.3	Pembinaan PTK PAUD yang merata.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PTK PAUD yang merata.	Persentase PTK PAUD berkualifikasi S1/D4	21,87	21,87	28,87	33,87	39,87	46,87	46,87
			Persentase PTK PAUD memperoleh peningkatan kompetensi	50,00	50,00	52,55	54,55	56,55	58,55	60,55
			Persentase PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan	35,00	35,00	2,00	54,55	56,55	58,55	60,55

			Persentase PTK PAUD yang meningkat karirnya	50,00	50,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
			Persentase PAUD yang memiliki PTK sesuai dengan SNP	35,00	35,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
SP.4.4	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD	Meningkat ketersediaan, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraannya dalam rangka penguatan peran strategis untuk mewujudkan revolusi mental	Jumlah pengawas yang bersertifikat pendidik	163	163	7	8	9	10	10
			Jumlah guru TK/TPA/KB memperoleh bantuan pendidikan kualifikasi S1/D4	45	45	45	47	50	52	55
			Jumlah Guru TK penerima tunjangan profesi	149	149	214	264	314	364	414
			Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan Profesi guru bukan PNS	173	173	193	393	593	793	993
			Jumlah Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional guru bukan PNS	87	87	90	120	150	180	210
			Kegiatan dukungan Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Guru dan Tendik PAUD	120	120	120	125	130	135	140

SP.4.5	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Meningkatnya profesionalisme Guru Pendidikan Dasar	Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) yang bersertifikat pendidik	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
			Jumlah Guru SD yang menerima tunjangan profesi tambahan (Tamsil)	335	335	335	335	335	335	335
			Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersertifikat pendidik	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
			Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan profesi guru bukan PNSD	205	205	205	205	205	205	205
			Jumlah Guru SMP yang menerima tunjangan profesi tambahan (Tamsil)	77	77	77	77	77	77	77
			Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan fungsional guru bukan PNS	314	314	314	314	314	314	314
			Jumlah Guru Dikdas dalam jabatan berkualifikasi akademik S-1/D-4	660	660	660	660	660	660	660
SP.4.6	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya	Jumlah guru yang berkompeten bidang TK/PLB	215	215	249	262	275	224	220
			Jumlah guru yang berkompeten bidang IPA	170	170	170	180	190	195	200

			Jumlah guru yang berkompeten bidang IPS dan Kewarganegaraan	200	200	200	250	260	280	300
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Matematika	211	211	211	235	245	250	280
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Penjas dan BK	122	122	122	142	155	165	175
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Bahasa	356	356	356	365	380	385	390
			Jumlah guru yang berkompeten bidang Seni dan Budaya	31	31	31	50	55	60	70
			Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	4	4	4	5	6	7	8
			Nilai rata-rata UKG Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	6,00	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00
SP.5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN									
SP.5.1	Terselenggaranya pelayanan pendidikan kepada masyarakat	Pelayanan Prima penunjang fungsi pendidikan	PAUD terakreditasi	20,00	20,00	24,71	29,42	34,13	38,84	43,55
			SD terakreditasi	84,03	84,03	84,10	84,17	84,24	84,31	84,38
			SMP terakreditasi	86,00	86,00	86,26	86,39	86,52	86,65	86,78
		Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh	Persentase TK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40,00	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

		jenjang pendidikan								
			Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	65,00	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	65,00	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Jumlah layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik	20,00	20,00	20,00	25,00	52,00	30,00	32,00
			Kegiatan yang mendapat dukungan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	1	1	1	25	52	30	32
			Kegiatan yang mendapat dukungan Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
			Kegiatan Penataan Asset Milik Daerah	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Pengadaan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik	1	1	1	1	1	1	1

			Jumlah orang yang mengikuti Bintek sistem aplikasi dapodik bagi operator	1.085	1.085	1.085				
			Kegiatan Penyelenggaraan Bintek dan sosialisasi implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah sekolah yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	1	1,00	1	1	1
			Jumlah guru SD yang menyelenggarakan diseminasi DBE3-USAID Prioritas	250	250	250	300	350	400	500
			Kegiatan penyusunan dokumen Peraturan Perundang-undangan tentang sarpras pendidikan	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah siswa yang mengikuti lomba-lomba Penyelenggaraan Olimpiade Sains Tk. Kabupaten Indramayu	1.350	1.350	1.350	1.400	1.410	1.415	1.420

			Jumlah siswa yang mengikuti Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten, Wilayah III dan Propinsi	80	80	80	85	85	90	90
			Kegiatan penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Kesiswaan	1.593	1.593	1.593	1.600	1.600	1.625	1.625
			Kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS dan SBL)	186	186	186	186	186	186	186
			Kegiatan Penyelenggaraan TUB dan Paskibra Kabupaten Indramayu	188	188	188	188	188	188	188
			Kegiatan operasional Penyelenggaraan Penunjang Tunjangan Tambahan dan Profesi Guru	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
			Kegiatan operasional Penyelenggaraan Penunjang Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
			Pelatihan peningkatan kompetensi guru	250	250	250	250	250	250	250

			Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta Koordinasi lintas sektoral bidang pendidikan	25	25	25	25	52	30	32
			Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Gerakan Membiasakan Budaya Membaca 15 menit setiap hari	20	20	20	25	52	30	32
			Jumlah Forum Koordinasi Komite Sekolah (FKKS)	31	31	31	31	31	31	31
SP.6	PROGRAM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS									
SP.6.1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal	terselenggaranya pendidikan bagi anak yang termarjinalkan	Jumlah PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan Ketrampilan bagi anak yang termarginalkan dan terlantar	120	120	120	150	275	300	450
SP.6.2	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK	Jumlah siswa /anak berkebutuhan khusus penerima bantuan atau beasiswa	25	25	25	25	25	25	25
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB /SLB/SM Inklusi/SM Cibi/SM keberbakatan yang menerima BOS	25	25	25	25	25	25	25

			Jumlah pusat pengembangan PKLK yang dibangun	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah ruang kelas SDLB/SMPLB/SMLB / SLB yang direhabilitasi	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah sentra/sub sentra/SLB pembina yang direhabilitasi	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah unit SDLB/SMPLB/SMLB baru yang dibangun	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah asrama siswa yang dibangun	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah paket layanan pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang melaksanakan kurikulum yang berlaku	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB /SLB yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB /SLB yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa	3	3	3	3	3	3	3

			Jumlah sekolah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan peralatan pendidikan	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan ruang penunjang lainnya	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah sekolah berwawasan pendidikan inklusif	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	3	3	3	3	3	3	3
			Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis PKLK	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB yang menerapkan pendidikan karakter	5	5	5	5	5	5	5
SP.7	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN LAINNYA									

SP.7.1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	90	90	90	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	90	90	90	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	94	94	94	96,82	99,72	100,00	100,00
		Penyediaan data dan statistik pendidikan	Persentase satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang tervalidasi dalam data warehouse	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase tersedianya data referensi pendidikan	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase peserta didik dan PTK yang tervalidasi dalam data warehouse	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase UPT pendidikan yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase UPT pendidikan terkoordinasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00

			Persentase UPT yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan Kemendikbud	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundangundangan	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Jumlah satuan pendidikan dalam rangka pelayanan data dan statistik pendidikan	1.095	1.095	1.095	1.097	1.100	1.105	1.110
			Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1
		Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase arsip dan dokumentasi terintegrasi dengan Kantor arsip dan dokumentasi Pemerintah Daerah	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan online	1.095	1.095	1.095	1.097	1.100	1.105	1.110
			Jumlah pegawai yang SDM terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK	1.095	1.095	1.095	1.097	1.100	1.105	1.110
			Jumlah pengaduan masyarakat dari pemangku	5	5	5	5	5	5	5

			kepentingan pendidikan							
		Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Pendidikan	sedang	sedang	sedang	sedang	baik	baik	baik
			Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah aparatur Dinas Pendidikan yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
		Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	12	12	12
			Pengadaan alat tulis kantor, Barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	12	12	12
			Penyediaan bahan bacaan dan	12	12	12	12	12	12	12

			peraturan perundang-undangan							
			Penyediaan makanan dan minuman	12	12	12	12	12	12	12
			Rapat-rapat koordinasi/konsultasi/ kunjungan ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	12	12	12
		Tercapainya Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	6	6	6	6	6	6	6
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	3	3	3	3	3	3
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/mobil jabatan	15	15	15	15	15	15	15
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1	1	1	1	1	1	1
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3	3	3	3	3	3	3
		Peningkatan pelayanan prima bidang	Persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan	85,00	85,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00

		pengelolaan anggaran dan akuntabilitas								
			Persentase Sekretariat/Bidang Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	85,00	85,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	12	12	12	12	12	12
			Skor kualitas LAKIP Dinas Pendidikan menurut penilaian Pemerintah Daerah	7,00	7,00	7,00	7,30	7,50	7,70	7,90
SP.7.2	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara	Tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	80,00	80,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
			Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pegawai dengan kinerja	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00

			minimal "baik"							
			Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
			Persentase pencapaian target kinerja program	90,00	90,00	90,00	92,70	95,48	98,35	100,00
SP.7.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah aparatur Dinas Pendidikan yang mengikuti Diklat jabatan, teknis dan fungsional	5	5	5	5	5	5	5
			Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
			Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
		Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
			Nilai Minimal LAKIP Dinas Pendidikan pada tahun 2021	71	71	71	76	79	82	85
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	sedang	sedang	sedang	baik	baik	baik	baik

		Opini Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NP.: 19601108 198109 1 005